

---

## **PARIAMAN MASA PEMERINTAHAN KOTA ADMINISTRATIF (1987-2002)**

**Syahrul Mubarak**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
[syahrul.mubarak9596@gmail.com](mailto:syahrul.mubarak9596@gmail.com)

---

### **Abstrak**

*Artikel ini menjelaskan rangkaian peristiwa mengenai perubahan status Pariaman dari sebuah kecamatan kemudian dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kota Administratif Pariaman di tahun 1987. Dalam meneliti permasalahan ini digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pendekatan sejarah. Dalam disiplin ilmu sejarah langkah-langkah dan prosedur kerja penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya (1) heuristik (pengumpulan sumber). Sumber yang digunakan yaitunya dari hasil wawancara dengan tokoh dan pelaku sejarah, arsip foto dan dokumen tentang Kota Pariaman, berita koran lama yang menuliskan kisah terjadinya Kota Otonom Pariaman sebagai sumber primer. Sumber sekunder diambil dari sumber-sumber literatur yang menjelaskan tentang daerah serta proses pembentukan sebuah daerah di Indonesia; (2) kritik sumber, (3) analisis sintesis (Interpretasi dan histografi). Hasil penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa dalam prosesnya awal mulanya merupakan sebuah kecamatan dan ibukota dari Kabupaten Padang Pariaman sebelum tahun 1986. Di tahun 1987 Pariaman dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kota Administratif Pariaman dengan PP No. 33 tahun 1986 oleh Mendagri. Keluarnya UU Nomor 22 tahun 1999 menyebutkan tidak lagi berlakunya status kota administratif dalam pemerintahan, sehingga kota administratif Pariaman harus dinaikkan statusnya menjadi Kota Otonom atau kembali menjadi kecamatan dan bagian dari kabupaten Padang Pariaman. Di tahun 2002 Kota Otonom Pariaman resmi ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 dengan status Pariaman sebagai Kota Otonom di wilayah Sumatera Barat setelah melalui dinamika dan proses perjuangan didalamnya.*

**Kata kunci:** *Pariaman, Kecamatan, Kota Administratif*

**Abstract**

*This article explains a series of events regarding the change in status of Pariaman from a sub-district to an Administrative City of Pariaman in 1987. In researching this problem, literature studies and field studies were used with a historical approach. In the discipline of history, the steps and procedures for research work are carried out through several stages, including (1) heuristics (collecting sources). The sources used are from interviews with historical figures and actors, photo archives and documents about the City of Pariaman, old newspaper reports that wrote the story of the Autonomous City of Pariaman as primary sources. Secondary sources are taken from literature sources that explain the region and the process of forming a region in Indonesia; (2) source criticism, (3) synthesis analysis (Interpretation and historiography). The results of the research that has been carried out reveal that in the process it was initially a sub-district and the capital of Padang Pariaman Regency before 1986. In 1987, Pariaman was raised to an Administrative City of Pariaman with PP No. 33 of 1986 by the Minister of Home Affairs. The issuance of Law Number 22 of 1999 stated that the status of administrative cities in the government was no longer valid, so the administrative city of Pariaman had to be raised to Autonomous City status or returned to being a sub-district and part of Padang Pariaman Regency. In 2002, the Autonomous City of Pariaman was officially established by Law Number 12 of 2002 with the status of Pariaman as an Autonomous City in the West Sumatra region after going through dynamics and struggle processes within it.*

**Keywords:** *Pariaman, Sub-district, Administrative City*

## A. PENDAHULUAN

Kota adalah suatu pemukiman yang relative besar, padat dan permanen yang dihuni oleh kelompok heterogen dari segi sosial. Kota merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal. Berbagai strata masyarakat bergabung dalam suatu tempat yang dikatakan kota. Kota juga merupakan simbol dari sebuah kesejahteraan, kesempatan berusaha dan dominasi terhadap wilayah sekitarnya. Disamping itu kota juga merupakan sumber polusi, kemiskinan dan perjuangan untuk berhasil. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 mengenai Penyusunan Rencana Kota, kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi (Suharini, 2007).

Kota merupakan pusat kegiatan manusia dan menawarkan berbagai kesempatan lebih besar daripada daerah pedesaan. Tidak mengherankan bahwa banyak penduduk pedesaan melakukan migrasi ke kota untuk memperbaiki kehidupannya. Migrasi desa – kota ini menyebabkan pertambahan penduduk kota secara umum kurang lebih dua kali lipat dibandingkan pertambahan penduduk pedesaan (Suharini, 2007).

Namun setiap kota memiliki kisah perjalanan yang banyak mengandung sejarah di dalamnya, seperti halnya Kota Surabaya, Bandung, Jakarta yang merupakan Kota Kolonial yang sudah ada sejak masa penjajahan. Namun ada juga kota lain yang memiliki sejarah yang saat ini banyak belum diketahui oleh banyak orang, sebut saja salah satunya Kota Pariaman.

Pariaman merupakan salah satu daerah rantau dari Minangkabau, seperti halnya Padang, Pasisia dan Tiku. Menurut struktur pemerintahan adat Minangkabau, rantau Pariaman dinamakan rantau Riak Nan Mamacah. Maksudnya ialah dimana harta pusakanya juga turun dari garis ibu. Sedangkan gelar pusaka, turun dari garis bapak. Waris gelar ini adalah setelah berumah tangga yang kemudian melekat kepada seorang laki-laki dengan gelar bapaknya seperti Sidi, Bagindo dan Sutan, hanya ada di Pariaman (Tanjung, 2006).

Sebelum diberlakukan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa, 1979, Pariaman merupakan sebuah Kecamatan yang sekaligus ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Secara Administratif, kecamatan Pariaman terdiri dari 9 Nagari, 53 Jorong/desa dan 16 kelurahan. Kemudian keluar pula surat Bupati Padang Pariaman nomor Pem.6437/2/1981 tanggal 25 Agustus 1981 yang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri kiranya Kota Pariaman sebagai Ibukota Kabupaten Padang Pariaman ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Tanjung, 2006).

Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah membawa dampak terhadap eksistensi Kota Administratif (Kotif) Pariaman. Karena

dalam Undang-Undang tersebut tidak lagi diatur eksistensi Kota Administratif sebagai wilayah Administratif. Konsekuensinya, Kota Administratif Pariaman bubar kembali ke wilayah induk semula atau ditingkatkan menjadi Kota Otonom (Tanjung, 2006). Dalam Bab II pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dijelaskan bahwa wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat Otonom. Banyak desakan yang terjadi di kalangan masyarakat dan mahasiswa yang meminta pemerintah untuk menaikkan status Kota Administratif Pariaman menjadi Kota Otonom, hingga akhirnya Kota Pariaman ditetapkan sebagai Kota Otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002, dengan memiliki luas wilayah sekitar 73,36 Km<sup>2</sup> (Pariaman, 2021).

Dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 2002 pada halaman 10 bagian penjelasan dijelaskan bahwa secara geografis wilayah Kota Administratif Pariaman mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, serta pariwisata, Kota Administratif Pariaman mempunyai prospek yang baik bagi pertumbuhan pasar di dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan selanjutnya di tuangkan secara formal dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 16 Mei 2001 Nomor 03/SK.D/DPRD.V/2001 tentang status Kota Administratif Pariaman dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 09/SB/2001 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap peningkatan status Kota Administratif Pariaman menjadi Kota Otonom, wilayah Kota Administratif Pariaman yang meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan perlu dibentuk menjadi Kota Pariaman (*UU No. 12 Tahun 2002*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasa perlu untuk mengangkat sebuah penelitian dengan mengambil judul, yaitu “Sejarah Pariaman pada masa pemerintahan Kota Administratif tahun 1987 hingga 2002”.

## **B. METODE PENELITIAN**

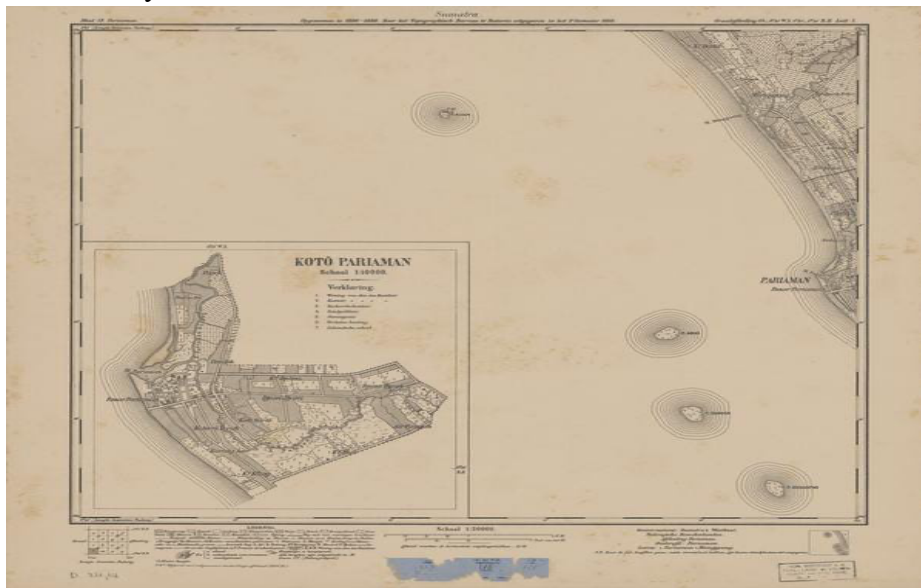
Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah melalui studi kepustakaan dan lapangan. Tahapannya meliputi heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (ekstern dan intern), analisis-sintesis (interpretasi), dan historiografi (penulisan) (Lois, 1997; Mestika, 2003). Data dikumpulkan dari studi pustaka (buku, dokumen, arsip, koran) di instansi seperti Dinas Kearsipan, Perpustakaan Kota, dan BPS Pariaman, serta dari penelitian lapangan seperti wawancara dengan tokoh sejarah, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan pelaku sejarah, masyarakat, dan pihak terkait pembentukan Kota Pariaman. Data yang terkumpul diseleksi,

diklasifikasi, dan dianalisis menjadi fakta untuk diinterpretasi, kemudian disusun dalam penulisan sejarah yang utuh.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pariaman Sebuah Kecamatan

Menurut data statistik Padang Pariaman tahun 1982, Pariaman memiliki luas 67 km<sup>2</sup> dan merupakan kecamatan terkecil dari 12 Kecamatan lainnya di Kabupaten Tk. II Padang Pariaman. Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Siberut Utara dengan luas wilayah 2.104 km<sup>2</sup>.



Gambar 1 Batavia: Topographisch Bureau 1889 (D D 42,3)

Pada awalnya Pariaman terdiri dari Sakarekhulu dan Sakarekhilia. Sakarekhulu meliputi Nagari Mangguang, III Koto Nareh, Tungka, Sikapak dan Cubadak Aia. Sedangkan Sakarekhilia meliputi Pasa Pariaman, V Koto Aia Pampan, IV Koto Sungairotan, IV Angkek Padusunan. Nagari di Sakarekhulu masing-masing memiliki pasar. Sedangkan Sakarekhilia hanya memiliki pasar Pariaman. Sehingga pasar di Pariaman awalnya dibangun orang dari empat nagari di Sakarekhilia. Ke empat nagari itu menguasai Pasar Pariaman.

Karenanya, jika dilakukan pembangunan pasar, masing-masing nagari di Sakarekhilia mendapatkan bagian. Harus ada satu bagian toko untuk masyarakat di nagari tersebut. Hal ini karena keempat nagari itu yang memiliki pasar Pariaman tempo dulunya. Sedangkan nagari Sakarekhulu memiliki pasar. Seperti di Nareh, dikenal adanya balai Nareh.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Pariaman merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibukota

Kabupaten Padang Pariaman. Secara administrasi, Pariaman terdiri dari 9 nagari, 53 jorong/desa dan 16 kelurahan.

Pertama, Nagari Pasa Pariaman memiliki 4 kelurahan, yakni Kelurahan Pasia Pariaman, Kampuangperak, Lohong dan Karan Aua. *Kedua*, Nagari V Koto Aiapaman memiliki 12 kelurahan dan 12 jorong. Masing-masing Kelurahan Alai Gelombang, Jawi-jawi I, Jawi-jawi II, Kampungjawo I, Kampungjawo II, Kampungpondok, Pondok II, Ujungbatuang, Jalan Baru, Taratak, Jalan Kereta Api, Jatihilia dan Jorong Jatimudiak, Kampuangbaru, Rawang, Kampuangsato, Koto kaciak, Labuahraya, Pasia pauh, Koto mandakek, Subarangpadang, Subarang cimparuah, Koto tengah dan Lapai cimparuah. *Ketiga*, Nagari Sungai Rotan, memiliki 9 Jorong, yakni Jorong Bungotanjung, Kampuang Tengah, Kajai, Kampuang Kandang, Kaluaik, Aia Santok, Cubadak Mentawai, Sungai Pasak dan Sungaisirah. *Ke empat*, Nagari IV Angkek Padusunan memiliki 7 jorong, yakni Jorong Kampuanggadang, Kampuangbaru, Pakasai, Talagosariak, Bato, Batangkabuang, dan Kotomarapak. *Kelima*, Nagari Mangguang memiliki 5 jorong, yakni Jorong Kotomarapak, Mangguang, Apa, Tanjungsaba, dan Ampalu.

*Ke enam*, Nagari Cubadak aia memiliki 5 jorong, yakni Jorong Cubadak Aia, Sirambang, Olo, Alai dan Kasiakputiah. *Ke Tujuh*, Nagari Tunga memiliki 5 Jorong, yakni Jorong Sikapak Usang, Hulubanda, Taji-taji, Sungaibatung, dan Durian gadang. *Ke Delapan*, Nagari Sikapak memiliki 5 Jorong, yakni Jorong Sikapak hilia, Sikapak mudiak, Sikapak kunik, Labung, dan Pakotan. *Kesembilan*, Nagari III Koto Nareh memiliki 6 Jorong, yakni Jorong Nareh Hilia, Nareh satu, Balai nareh, Padang birik-birik, Sintuak Sungai Rambai dan Sungai Rambai (Damsuar, t.t.).

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka kedudukan nagari sebagai unit pemerintahan terendah dibawah Camat digantikan Desa atau Kelurahan. Jorong yang pada pemerintahan nagari merupakan wilayah administratif secara otomatis dijadikan desa dan kelurahan yang memiliki pemerintahan sendiri.

Dari ulasan panjang diatas dapat kita pahami bahwa wilayah Pariaman mengalami perubahan. Ketika masa pemerintahan Belanda, wilayah Padang Pariaman terdiri dari 3 Kecamatan, Yaitu Kecamatan Pariaman, Kecamatan Kayutanam dan Kecamatan Lubuk Basung Tiku. Kecamatan Pariaman ketika itu terdiri dari beberapa laras, dari Laras Pariaman sampai Laras Ulakan. Ini menggambarkan bahwa Kecamatan Pariaman ketika itu luas. Kemudian setelah kemerdekaan, Padang Pariaman menjadi 13 kecamatan, dan Kecamatan Pariaman memiliki luas 67 km<sup>2</sup> dan merupakan kecamatan dengan luas terkecil diantara 12 kecamatan lainnya.

## 2. Latar Belakang Lahirnya Kota Administratif Pariaman

Setahun setelah kemerdekaan RI, tepatnya 1946 keinginan dari masyarakat Pariaman menjadikan Pariaman menjadi kota mulai bermunculan (Tanjung, 2006). Hal ini mengingat pentingnya Kota Pariaman sejak lama. Posisi Pariaman merupakan tiga kota penting di Sumatera Tengah yang di bangun Belanda, yaitu Padang, Bukittinggi dan Pariaman. Semasa pemerintahan Belanda berkuasa, Pariaman termasuk kota sentral. Ini di buktikan dengan ditempatkannya satu orang residen di Pariaman. Jadi Pariaman menjadi kota sentral di Sumatera Tengah, tidak hanya di Sumatera Barat (Tanjung, 2006).

Perjuangan melawan bangsa penjajah Belanda kembali ke Indonesia menyebabkan gagasan tersebut tersingkirkan. Fokus masyarakat adalah bagaimana memerangi tentara Belanda. Tahun 1950 kembali muncul keinginan mewujudkan Kota Pariaman. Diantara pelopornya adalah Sidi Hasan Mursyid, Pak Apuak dan Amir Om. Sidi Hasan Mursyid suku Piliang adalah kepala pasar zaman Belanda, Wali Nagari Pasa Pariaman dan pernah menjadi anggota DPRD PadangPariaman tahun 1970-an. Amir Om suku Chaniago pemuka masyarakat Kampung Perak dan Pak Apuak pemuka masyarakat Pariaman (Tanjung, 2006).

Perkembangan Kecamatan Pariaman sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman cukup pesat, yakni sekitar 4 persen per tahun. Dari perkembangan tersebut, Pariaman dimungkinkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah. Apalagi sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman fungsinya terus meningkat baik sebagai pusat perdagangan, pendidikan, sosial budaya maupun pemerintahan (Hasan, 2021).

Adapun faktor yang menunjang terwujudnya Kota Pariaman sebagai Kota Administratif adalah:

1. Kepadatan Penduduk

Pengembangan Kota Administratif Pariaman selain sebagai wilayah kecamatan Pariaman, diperluas dengan 14 desa dari Kecamatan Nan Sabaris dan 2 desa dari Kecamatan VII Koto. Sehingga wilayahnya menjadi 73,36 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 52.000 jiwa.

2. Fasilitas Sosial Ekonomi

Sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman, berbagai fasilitas sosial dan ekonomi terus berkembang di Pariaman seperti tersedianya pusat perdagangan, perbelanjaan, kesehatan, rumah ibadah, fasilitas pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi dan sebagainya.

3. Transportasi dan Komunikasi

Makin lancarnya transportasi dari kelurahan/desa ke wilayah lainnya di sekitar Pariaman. Selain itu, di Pariaman terdapat pelayanan jasa telpon, kantor pos cabang, terminal angkutan kota dalam provinsi dan antar provinsi.

4. Mata Pencarian dan Lapangan Kerja

Makin berkembangnya Pariaman dengan pertumbuhan yang menggembirakan, sekaligus terbukanya berbagai lapangan kerja baru bagi penduduk, terutama sektor perdagangan, jasa dan industri kecil menengah.

5. Fasilitas Bangunan dan Perumahan

Sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman, berdiri berbagai bangunan milik pemerintah, swasta, lembaga perbankan dan kompleks perumahan sebagaimana layaknya ciri sebuah kota (Damsuar, t.t.).

Faktor diatas menjadi modal dasar yang diajukannya kecamatan Pariaman menjadi Kota Administratif Pariaman. Selain Pariaman, di Sumbar ada beberapa daerah yang diajukan menjadi Kotif ketika itu, sebut saja Lubuk Alung yang merupakan daerah strategis yang berada di jalan lintas Padang-Bukittinggi yang sangat cocok untuk menjadi Kota Administratif ketika itu. Dan juga Batusangkar yang merupakan ibukota Kabupaten Tanah Datar yang juga didaftarkan menjadi Kotif. Namun karena lobi dari pemerintah dan juga tokoh perantau Pariaman, maka Pariaman lah yang dipilih untuk menjadi Kotif (Hasan, 2021).

Dari data diatas dapat kita pahami bahwa selain fasilitas yang disebutkan tadi, ada juga alasan kenapa Pariaman dijadikan menjadi Kotif adalah karena perkembangan Kecamatan Pariaman yang begitu pesat selaku ibukota Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu rasanya ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Akhirnya Pariaman ditetapkan sebagai Kota Administratif dengan PP No. 33 tahun 1986 oleh Mendagri.

### 3. Kondisi Daerah

Langkah awal mewujudkan Kota Administratif Pariaman adalah rumusan antara aksekutif dengan Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Padang Pariaman 4 Maret 1980. Dalam rumusan itu disebutkan akan ditempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan Pariaman menjadi Kota Administratif. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman Kolonel Anas Malik (alm) dengan piawai melobi dan meyakinkan DPRD tentang rencana Kota Administratif ini (Tanjung, 2021).

Selanjutnya, turun tim dari Direktorat Bina Kota Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri yang didampingi kepala bagian Pengembangan Kota Biro Pemerintahan kantor Gubernur Sumatera Barat ke Padang Pariaman 13 Februari 1981. Tim mengadakan penelitian pendahuluan terhadap kemungkinan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dijadikan kota administratif.



Tindak lanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, Ir. Azwar Anas melalui suratnya Nomor Pem.68/I/1981 tanggal 9 April 1981 menyampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman tentang rencana Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat mengusulkan peningkatan status kecamatan Pariaman menjadi Kota Administratif kepada pemerintah pusat.

Bupati Kepala Daerah II Padang Pariaman menyambut baik usulan tersebut. Ini dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman nomor 66/SK/BPP/1981 tentang dibentuknya tim persiapan Kota Administratif Pariaman. Anggotanya terdiri dari staf Pemda dan dilengkapi dengan unsur dinas dan jawatan di lingkungan Pemda Tingkat II Padang Pariaman.

Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman juga dilakukan sidang komisi dan gabungan 19 Agustus 1981 yang membahas rencana tersebut. Sehingga keluar SK nomor 04/Kpts/DPRD/1981 tanggal 20 Agustus 1981 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: mengusulkan kepada pemerintahan pusat agar status ibukota Kabupaten Padang Pariaman ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif yang terdiri dari 85 jorong/desa/kelurahan.

Kedua: mengusulkan pembentukan tiga kecamatan dalam Kota Administratif yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Pariaman Utara (Sakarek Ulu) yang terdiri dari 25 desa/kelurahan yang berkedudukan di Nareh.
- b. Kecamatan Pariaman Tengah (Sakarek Hilia) yang terdiri dari 44 kelurahan/desa yang berkedudukan di Pariaman Pusat.
- c. Kecamatan Pariaman Selatan yang terdiri dari 16 desa/kelurahan yang berkedudukan di Kuraitaji (Damsuar, t.t.).

Sejalan dengan itu, keluar pula surat Bupati Padangpariaman Anas Malik nomor Pem.6437/2/1981 tanggal 25 Agustus 1981 yang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, kiranya Kecamatan Pariaman sebagai ibukota Kabupaten Padangpariaman di tingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif.



Gambar 2 Peta Kota Administratif Pariaman (BPS Kota Pariaman)

Wilayah Kotif meliputi seluruh Kecamatan Pariaman, ditambah sebagian wilayah Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Nagari Kuraitaji dan Nagari Sunua. Nagari Lareh Nan Panjang 2 desa yakni Rambai dan Pungguanglading. Sebanyak 13 desa/jorong di Nagari Kuraitaji dan 1 di Nagari Sunua. Inilah sumbangan berharga kecamatan yang berada di sekitar Kecamatan Pariaman untuk mewujudkan Kotif Pariaman. Tidak seperti daerah lain yang menimbulkan gejolak, bahkan penyelesaiannya bertahun-tahun (Tanjung, 2021).

Balasan dari surat Bupati Padang Pariaman tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 650/209/PUOD tanggal 20 Januari 1983 dapat menyetujui peningkatan status Pariaman menjadi Kota Administratif.

Sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden nomor 23 tahun 1973, harus ada tanggapan dan pendapat para menteri yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menko Kesra, Menhankam, Menko Ekuin/Ketua Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan) dan Menteri Keuangan. Menteri Dalam Negeri dengan suratnya bernomor 650/4052/PUOD sampai nomor 650/4056/PUOD tanggal 29 November 1982 meminta pendapat anggota PUOD. Dalam waktu relatif singkat, surat itu mendapat tanggapan positif.

Untuk memperkuat usulan Kota Administratif, pembangunan fisik dan perkantoran mulai disebar. Seperti di awal tahun 1980-an, pembangunan kantor KODIM ditempatkan di wilayah selatan, yakni Toboh Palapah. Sebelum tahun 1980-an pun dibangun SMP di Kuraitaji, Nareh, dan Padusunan. Sehingga pembangunan sarana fisik di pinggiran tersebut dapat dijadikan alasan terwujudnya pembagian wilayah menjadi Kotif.

Untuk mengetahui sejauhmana persiapan dan pengalaman dalam mewujudkan Kota Administratif, DPRD Kabupaten Padang Pariaman melakukan studi banding ke tiga Kotif, yakni Lubuk Linggau, Dumai dan Denpasar. Alasan studi banding ke Lubuklinggau adalah cukup banyak orang Pariaman di sana dan berperan cukup aktif. Kepada mereka, DPRD Padang Pariaman bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Kotif Dumai merupakan Kotif baru berdiri dengan potensi pelabuhan. Sesuai dengan Pariaman yang juga memiliki pantai dan pelabuhan. Sedangkan Denpasar merupakan Kotif yang berkembang pesat dengan industri pariwisata. Dengan perkembangan pariwisata tersebut, Denpasar mampu menyumbang ke daerah tetangganya, seperti kabupaten Badung. Denpasar menyadari betul daerah tetangganya banyak dikunjungi wisatawan, tapi mereka menginap di Denpasar. Artinya, pendapatan lebih banyak masuk ke Denpasar. Namun Denpasar sendiri memberikan sumbangan PAD ke Badung. Inilah alasan

DPRD Kabupaten Padang Pariaman studi banding ke Kotif tersebut (Tanjung, 2021).

Adapun Walikota Administratif Kota Pariaman tahun 1987 sampai 2002 antara lain:

**a. Drs. Adlis Legan**

Drs. Adlis Legan adalah Walikota Administratif Pariaman yang pertama sejak Kota Pariaman ditetapkan menjadi kota Administratif tahun 1987. Ia dilantik sebagai Walikota Administatif Pariaman tanggal 29 Oktober 1987 bersamaan dengan peresmian Kota Administratif Pariaman oleh Menteri Dalam Negeri, Seopardjo Reostam. Ia dilantik dengan SK Gubernur Sumatera Barat nomor UP.2925/5/DN-1987 tertanggal 17 September 1987. Drs. Adlis Legan menjabat periode 1987 sampai 1993.

**b. Drs. Martias Mahyuddin, M.Sc**

Drs. Martias Mahyuddin, M.Sc adalah walikota Administratif Pariaman yang kedua. Ia menjabat pada periode 1993 sampai 1998 setelah periode Drs. Adlis Legan berakhir di tahun 1993. Prestasinya sebagai camat teladan mengantarkan Martias Mahyudin menjadi Walikota Administratif Pariaman. Atasannya memilih Martias karena dinilai seorang pekerja yang bisa membawa Kota Pariaman berubah (Tanjung, 2021).

Ketika masa tugas Wakotif Adlis Legan berakhir, Gubernur Sumatera Barat Drs. Hasan Basri Durin meminta Bupati Padangpariaman, Zainal Bakar untuk mengusulkan pengganti Adlis Legan. Syarat nama yang di usulkan haruslah pejabat yang pangkatnya minimal III/D.

Ada tiga nama yang di usulkan, yakni Drs. Martias Mahyudin, Drs. Asril Nur, Drs. Altisokla Epito. Dari segi kepangkatan, Martias Mahyudin belum memenuhi syarat karena pangkatnya baru III/C. Namun, Martias Mahyudin memiliki 3 alasan untuk dicalonkan.

Pertama, menjadi Camat teladan di Sumatera Barat. prestasinya sebagai Camat Lubuk Alung dinilai layak dihargai sehingga meraih camat teladan. Kedua, pembangunan proyek irigasi Batang Anai yang berlokasi di Lubuk Cimantuang Kecamatan Lubuk Alung dapat dikatakan sukses tahun 1990. Irigasi ini mampu mengaliri areal sawah sekitar 13.600 ha lebih pertanian masyarakat sejak dari kecamatan Lubuk Alung hingga kecamatan Nan Sabaris. *Ketiga*, pembangunan PLTA di Kecamatan Lubuk Alung juga berjalan sukses (Tanjung, 2014).

**c. Drs. Firdaus Amin**

Drs. Firdaus Amin adalah Walikota Administratif Pariaman yang ketiga setelah Martias Mahyuddin. Ia menjabat sebagai walikota Administratif

Pariaman periode 1998 sampai 2002. Pada periode beliaulah Kota Administratif Pariaman berubah status menjadi kota Otonom. Dan ia juga merupakan pejabat walikota Pariaman yang pertama setelah Kota Pariaman berganti status menjadi kota otonom. Ia menjabat sebagai Pejabat Walikota periode 2002 sampai Agustus 2003.

Perubahan status Kota Administratif Pariaman menjadi Kota Otonom Pariaman merupakan buah tangan Drs. Firdaus Amin. Dimasa pemerintahannya, proses panjang Pariaman dari Kotif menjadi Kota Otonom.

Firdaus Amin terlahir dari pasangan Bagindo Amin Bakar dan Siti Nurhaman. Ayahnya seorang pegawai yang pernah menjabat Wedana, setingkat Camat. Jalan hidup Firdaus ternyata mengikuti ayahnya, jabatan Camat beberapa kali diembannya. Tahun 1978, Firdaus tercatat sebagai camat di Kecamatan Koto Baru. Dua tahun kemudian, Firdaus dipindahkan menjadi Camat di Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota.

Tahun 1984, Bupati Padangpariaman memanggilnya pulang, juga menjadi Camat di Lubuk Alung. Habis masa jabatannya di Lubuk Alung, Anas Malik memintanya lagi menjadi Camat di Sungai Limau. Di Sungai Limau, Firdaus mencatat banyak prestasi, diantaranya, berhasil mengantarkan Sungai Limau menjadi Kecamatan terbaik, dan Firdaus Amin pun menjadi camat terbaik. Ini pulalah alasan Firdaus Amin diangkat jadi Walikota Administratif Pariaman menggantikan Martias Mahyudin. Martias Mahyudin serahterima dengan Firdaus Amin pada Oktober 1998, disaksikan Bupati Padangpariaman, Ir. Nasrul Syahrudin (Tanjung, 2014).

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa situasi daerah Pariaman sebelum menjadi sebuah Kotif, Pariaman memiliki luas wilayah 67 km<sup>2</sup>. Kemudian ditetapkan menjadi Kotif dengan menambahkan beberapa wilayah disebelahnya, sehingga luas Pariaman saat ini 73,36 km<sup>2</sup>. Adapun wilayah yang bergabung dengan Kotif Pariaman yaitu dari Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. Kotif Pariaman sendiri terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah dan Pariaman Selatan. Sementara Walikota Adminisratif Pariaman yang pertama adalah Drs. Adlis Legan yang dilantik dengan SK Gubernur Sumatera Barat. Sementara Walikota Administratif yang terakhir adalah Firdaus Amin.

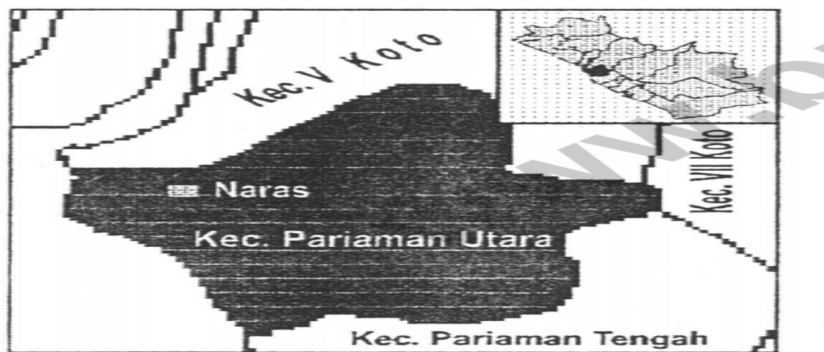
#### **4. Letak Geografis, Batas dan Luas Kota Administratif Pariaman**

Luas wilayah Kecamatan Pariaman sebelumnya hanya memiliki wilayah seluas 67 km<sup>2</sup>. Namun setelah Kecamatan Pariaman dinaikkan statusnya menjadi Kota Administratif Pariaman, Kotif Pariaman memiliki luas wilayah yaitunya 73,36 km<sup>2</sup> karena peluasan wilayah yang berasal dari Kecamatan Nan Sabaris dan

Kecamatan VII Sungai SariaK sehingga Kota Administratif Pariaman terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Adapun luas wilayah Kotif Pariaman berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut:

**a. Kecamatan Pariaman Utara**

Kecamatan Pariaman Utara adalah kecamatan yang terletak di sudut Kota bagian Utara. Kecamatan ini memiliki letak Geografis 100° 07' 00' Bujur Timur dan 0° 38' 00" Lintang Utara/Lintang Selatan. Kecamatan Pariaman Utara di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pariaman Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto/ Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Kecamatan Pariaman Tengah. Adapun luas daerah Kecamatan Pariaman Utara menurut data tahun 1988 adalah 28,41 km<sup>2</sup> dengan ketinggian diatas permukaan laut +2 Meter.



Gambar 3 Peta Kecamatan Pariaman Utara tahun 1998 (Sumber: BPS Kota Pariaman)

Adapun nama Desa, luas daerah dan jumlah penduduk di Kecamatan Pariaman Utara tahun 1988 adalah:

Tabel 1 Nama Desa, luas daerah dan jumlah penduduk tahun 1988

| NO | Nama Desa      | Luas (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1  | Talago SariaK  | 1,25                    | 1.181           |
| 2  | Pakasai        | 1,10                    | 900             |
| 3  | Kampung Baru   | 1,01                    | 2.000           |
| 4  | Kampung Gadang | 1,50                    | 1.041           |
| 5  | Ampalu         | 1,08                    | 923             |
| 6  | Apar           | 0,88                    | 716             |
| 7  | Tanjung Sabar  | 0,86                    | 433             |
| 8  | Olo            | 0,64                    | 625             |
| 9  | Alai           | 0,20                    | 503             |
| 10 | Sikapak Hilir  | 0,73                    | 578             |
| 11 | Sikapak Mudik  | 0,98                    | 667             |
| 12 | Padang Kunik   | 1,15                    | 327             |
| 13 | Lahang         | 0,76                    | 228             |
| 14 | Pakotan        | 0,30                    | 426             |

|               |                    |       |        |
|---------------|--------------------|-------|--------|
| 15            | Cubadak Air        | 1,14  | 1.500  |
| 16            | Sikapak Usang      | 0,52  | 416    |
| 17            | Mangguang          | 1,15  | 1.257  |
| 18            | Naras Hilir        | 0,78  | 376    |
| 19            | Naras I            | 1,03  | 1.999  |
| 20            | Balai Naras        | 1,03  | 1.805  |
| 21            | Padang Birik-Birik | 0,57  | 683    |
| 22            | Sintuk             | 0,98  | 638    |
| 23            | Sungai Rambai      | 1,09  | 1.046  |
| 24            | Kasiak Putih       | 1,39  | 793    |
| 25            | Sirambang          | 1,63  | 637    |
| 26            | Hulu Bandar        | 1,10  | 712    |
| 27            | Taji- Taji         | 0,90  | 480    |
| 28            | Durian Gadang      | 0,90  | 475    |
| 29            | Sungai Batung      | 0,90  | 712    |
| <b>Jumlah</b> |                    | 28,41 | 25.077 |

Sementara berdasarkan data tahun 1998, nama Desa, luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Pariaman Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Nama Desa, Luas Daerah dan Jumlah Penduduk tahun 1998

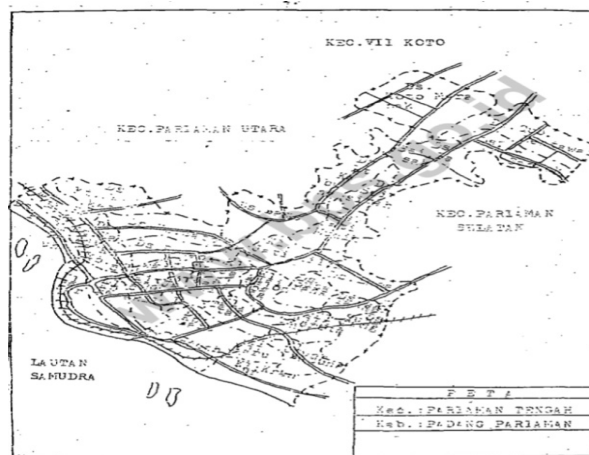
| No            | Nama Desa           | Luas (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk |
|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 1             | Ampalu              | 1,08                    | 1.115           |
| 2             | Kampung Gadang      | 1,50                    | 1.193           |
| 3             | Talago Sariak       | 1,25                    | 1.190           |
| 4             | Pakasai             | 1,10                    | 1.108           |
| 5             | Kampung Baru        | 1,01                    | 1.229           |
| 6             | Tanjung Sabar       | 0,86                    | 508             |
| 7             | Apar                | 0,88                    | 862             |
| 8             | Manggung            | 1,15                    | 1.407           |
| 9             | Cubadak Air         | 1,14                    | 1.064           |
| 10            | Naras Hilir         | 0,78                    | 862             |
| 11            | Naras I             | 1,03                    | 2.062           |
| 12            | Balai Naras         | 1,03                    | 1.188           |
| 13            | Padang Birik-Birik  | 0,87                    | 736             |
| 14            | Sintuk              | 0,98                    | 714             |
| 15            | Sungai Rambai       | 1,09                    | 1.001           |
| 16            | Cubadak Air Selatan | 0,84                    | 820             |
| 17            | Sikapak Barat       | 2,56                    | 1.525           |
| 18            | Sikapak Timur       | 1,91                    | 1.003           |
| 19            | Tungkal Selatan     | 2,52                    | 1.351           |
| 20            | Cubadak Air Utara   | 3,03                    | 1.267           |
| 21            | Tungkal Utara       | 1,80                    | 845             |
| <b>Jumlah</b> |                     | 28,41                   | 23.050          |

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa antara tahun 1988 dan 1998 terjadi pengurangan jumlah Desa yang ada di kecamatan Pariaman Utara dari yang sebelumnya berjumlah 29 Desa di tahun 1988 menjadi 21 Desa di tahun 1998. Sementara untuk jumlah penduduk di Kecamatan juga mengalami

penurunan, terlihat di tahun 1988 jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Utara berjumlah 25.077, mengalami penurunan di tahun 1998 menjadi 23.050 jiwa.

#### b. Kecamatan Pariaman Tengah

Kecamatan Pariaman Tengah merupakan pusat ibukota dari Kota Pariaman. Kecamatan ini berada di tengah Kota Pariaman yang memiliki tempat-tempat penting pemerintahan. Secara Geografis, Kecamatan Pariaman Tengah terletak di 100° 08' 00' Bujur Timur, 0° 33' 30" Lintang Utara/ Lintang Selatan. Secara letak perbatasan, sebelah utara Kecamatan Pariaman Tengah berbatasan dengan Kecamatan Pariaman Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pariaman Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto/ Pariaman Utara. Sementara berdasarkan data tahun 1988, Kecamatan Pariaman Tengah memiliki luas wilayah 26,69 km<sup>2</sup> dengan ketinggian +2 Meter dari permukaan laut.



Gambar 4 Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 1988 (Sumber : BPS Kota Pariaman)

Kecamatan Pariaman Tengah juga satu-satunya Kecamatan di Kota Administratif Pariaman yang memiliki Desa dan Kelurahan secara bersamaan. Terdapat beberapa Desa di Kecamatan Pariaman Tengah yang juga disertai terdapat beberapa Kelurahan.

Adapun jumlah desa, luas wilayah dalam hitungan desa dan jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Tengah menurut data tahun 1988 adalah:

Tabel 3 Nama Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk di Kecamatan Pariaman Tengah tahun 1988 (Badan Pusat Statistik Pariaman Selatan, 1988)

| No | Nama Desa/Kelurahan | Luas (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk |
|----|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 1  | Karan Aur (L)       | 1,10                    | 1.171           |
| 2  | Kampung Perak (L)   | 0,60                    | 1.082           |
| 3  | Lohong (L)          | 0,90                    | 1.396           |
| 4  | Pasir (L)           | 0,90                    | 1.475           |
| 5  | Pasir Pauh          | 0,55                    | 758             |

|        |                       |       |        |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| 6      | Labuh Raya            | 0,55  | 848    |
| 7      | Koto Kaciak           | 0,60  | 282    |
| 8      | Kampung Pondok (L)    | 0,50  | 779    |
| 9      | Pondok II (L)         | 0,55  | 1.339  |
| 10     | Kampung Sato          | 0,80  | 516    |
| 11     | Kampung Jawa I (L)    | 0,30  | 1.033  |
| 12     | Kampung Jawa II (L)   | 0,35  | 912    |
| 13     | Rawang                | 0,80  | 690    |
| 14     | Subarang              | 0,72  | 663    |
| 15     | Subarang Padang       | 0,55  | 259    |
| 16     | Alai Gelombang (L)    | 0,65  | 1.018  |
| 17     | Kampung Baru Pariaman | 0,80  | 2.194  |
| 18     | Jawi- Jawi I (L)      | 0,33  | 759    |
| 19     | Jawi-Jawi II (L)      | 0,30  | 974    |
| 20     | Jalan Baru (L)        | 0,35  | 216    |
| 21     | Taratak (L)           | 0,55  | 738    |
| 22     | Jalan Kereta Api (L)  | 0,45  | 672    |
| 23     | Ujung Batung (L)      | 0,55  | 631    |
| 24     | Kampung Tengah        | 0,33  | 608    |
| 25     | Lapai                 | 0,70  | 632    |
| 26     | Cubadak Mentawai      | 1,40  | 698    |
| 27     | Air Santok            | 1,23  | 1.030  |
| 28     | Sei Pasak             | 1,65  | 958    |
| 29     | Jati Hilir (L)        | 0,80  | 507    |
| 30     | Jati Mudik            | 0,70  | 755    |
| 31     | Sei Sirah             | 0,63  | 436    |
| 32     | Koto Marapak          | 2,15  | 1.276  |
| 33     | Batang Kabung         | 1,35  | 1.261  |
| 34     | Bato                  | 1,30  | 650    |
| 35     | Koto Mandaket         | 0,80  | 447    |
| Jumlah |                       | 26,69 | 29.663 |

Adapaun Jumlah Penduduk, Desa/Kelurahan di Kecamatan Pariaman Tengah tahun 1998 sebagai berikut:

Tabel 4 Nama Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Pariaman Tengah tahun 1998 (Badan Pusat Statistik Pariaman Selatan, 1988)

| No  | Nama Desa/Kelurahan | Luas (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk |
|-----|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 1.  | Pasir               | 1,10                    | 1.084           |
| 2.  | Kp. Perak           | 0,60                    | 933             |
| 3.  | Pondok II           | 0,90                    | 1.049           |
| 4.  | Lohong              | 0,90                    | 1.184           |
| 5.  | Jawi-Jawi I         | 0,55                    | 740             |
| 6.  | Jawi-Jawi II        | 0,55                    | 1.300           |
| 7.  | Kp. Jawa I          | 0,60                    | 852             |
| 8.  | Kp. Jawa II         | 0,50                    | 766             |
| 9.  | Kp. Pondok          | 0,55                    | 1.346           |
| 10. | Alai Gelombang      | 0,30                    | 1.104           |
| 11. | Taratak             | 0,35                    | 804             |
| 12. | Jalan Kereta Api    | 0,80                    | 631             |
| 13. | Ujung Batung        | 0,65                    | 220             |

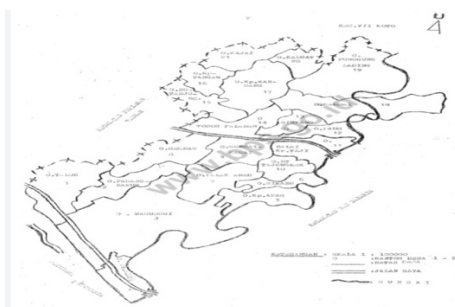


|        |                  |       |        |
|--------|------------------|-------|--------|
| 14.    | Jalan Baru       | 0,80  | 1.602  |
| 15.    | Karan Aur        | 0,33  | 541    |
| 16.    | Jati Hilir       | 0,30  | 3.251  |
| 17.    | Kp. Baru         | 0,35  | 858    |
| 18.    | Rawang           | 0,55  | 531    |
| 19.    | Jati Mudik       | 0,45  | 652    |
| 20.    | Bato             | 0,55  | 1.058  |
| 21.    | Batang Kabung    | 1,40  | 1.143  |
| 22.    | Koto Marapak     | 1,23  | 374    |
| 23.    | Sei. Sirah       | 1,65  | 976    |
| 24.    | Sei. Sirah       | 0,80  | 374    |
| 25.    | Air Santok       | 0,70  | 955    |
| 26.    | Cubadak Mentawai | 0,63  | 602    |
| 27.    | Pauh Timur       | 2,15  | 1.073  |
| 28.    | Pauh Barat       | 1,35  | 1.767  |
| 29.    | Cimparuah        | 1,30  | 3.020  |
| Jumlah |                  | 26,69 | 30.792 |

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijelaskan bahwa terjadi pengurangan jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pariaman Tengah tahun 1988 dan 1998. Pada data tahun 1988, Kecamatan Pariaman Tengah memiliki 35 Desa/Kelurahan. Sementara sepuluh tahun setelahnya, yaitu tahun 1998, jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pariaman Tengah berkurang menjadi 29 Desa/Kelurahan. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan beberapa desa yang sebelumnya terpisah kemudian dijadikan satu desa baru. Selain jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan ini juga mengalami perubahan jumlah penduduk. Hanya saja berbeda dengan jumlah Desa/Kelurahan, jumlah penduduk Kecamatan Pariaman antara tahun 1988 dan 1998 mengalami sedikit kenaikan. Pada data penduduk tahun 1988, jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Tengah berjumlah 29.633 jiwa, sementara jumlah ini naik di tahun 1998 menjadi 30.792 jiwa.

### c. Kecamatan Pariaman Selatan

Kecamatan Pariaman Selatan adalah salah satu dari tiga Kecamatan pada masa Pemerintahan Kota Administratif Pariaman yang terbentuk pada tahun 1987. Berdasarkan data pada tahun 1988, Kecamatan Pariaman Selatan memiliki luas 24,07 Km. Adapun batas wilayah Kecamatan Pariaman Selatan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan VII Koto, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pariaman Tengah dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris (Badan Pusat Statistik Pariaman Selatan, 1988).



Gambar 5 Peta Kecamatan Pariaman Selatan 1988 (BPS)

Adapun nama Desa dan jumlah penduduk di Kecamatan Pariaman Selatan tahun 1988 adalah:

Tabel 4 Nama Desa, Luas dan Jumlah Penduduk tahun 1988 (Badan Pusat Statistik Pariaman Selatan, 1988)

| No.           | Nama Desa          | Luas (ha)    | Jml. Penduduk |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| 1             | Taluk              | 1,10         | 1.552         |
| 2             | Padang Cakur       | 0,89         | 256           |
| 3             | Marunggi           | 5,73         | 2.754         |
| 4             | Pasir Sunur        | 0,70         | 328           |
| 5             | Sikabu             | 0,45         | 248           |
| 6             | Palak Aneh         | 0,73         | 879           |
| 7             | Kampung Apar       | 0,80         | 651           |
| 8             | Merbau             | 0,81         | 670           |
| 9             | Sungai Kasai       | 0,87         | 462           |
| 10            | Batang Tajongkek   | 0,93         | 610           |
| 11            | Balai Kuraitaji    | 0,60         | 1.243         |
| 12            | Pauh Kuraitaji     | 0,60         | 658           |
| 13            | Simpang            | 0,30         | 576           |
| 14            | Toboh Palapah      | 0,97         | 818           |
| 15            | Bungo Tanjung      | 1,55         | 1197          |
| 16            | Kp.Tengah S. Rotan | 0,61         | 525           |
| 17            | Kampung Kandang    | 1,49         | 768           |
| 18            | Rambai             | 0,78         | 828           |
| 19            | Punggung Lading    | 2,22         | 1.516         |
| 20            | Kaluat             | 0,84         | 555           |
| 21            | Kajai              | 1,10         | 704           |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>2,407</b> | <b>17.798</b> |

Sementara berdasarkan data tahun 1998, luas Kecamatan Pariaman Selatan masih memiliki luas yang sama dengan tahun 1988 saat satu tahun ditetapkan sebagai Kecamatan di Kota Administratif Pariaman, yaitu 2,407 ha atau 24,07 km<sup>2</sup>. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Selatan pada tahun 1998 mengalami kenaikan sebagai berikut:

Tabel 5 Nama Desa dan Jumlah Penduduk Tahun 1998 (Selatan, 1998)

| No | Nama Desa    | Jumlah Penduduk |
|----|--------------|-----------------|
| 1  | Taluk        | 1.550           |
| 2  | Padang Cakur | 248             |
| 3  | Marunggi     | 2.710           |
| 4  | Pasir Sunur  | 386             |

|               |                    |               |
|---------------|--------------------|---------------|
| 5             | Sikabu             | 293           |
| 6             | Palak Aneh         | 805           |
| 7             | Kampung Apar       | 688           |
| 8             | Marabau            | 728           |
| 9             | Sungai Kasai       | 550           |
| 10            | Batang Tajongkek   | 702           |
| 11            | Balai Kuraitaji    | 1.281         |
| 12            | Pauh Kuraitaji     | 728           |
| 13            | Simpang            | 618           |
| 14            | Toboh Palapah      | 1.070         |
| 15            | Bungo Tanjung      | 1.334         |
| 16            | Kp.Tengah S. Rotan | 425           |
| 17            | Kampung Kandang    | 868           |
| 18            | Rambai             | 958           |
| 19            | Punggung Lading    | 1.710         |
| 20            | Kaluat             | 564           |
| 21            | Kajai              | 566           |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>18.782</b> |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Desa di Kecamatan Pariaman Selatan tahun 1988 sama dengan jumlah Desa tahun 1998, begitupun dengan luas wilayah. Hanya saja untuk jumlah penduduk antara 1988 dan tahun 1998 mengalami sedikit pengurangan. Terlihat di tahun 1988, jumlah penduduk di Kecamatan Pariaman Selatan berjumlah 17.798 jiwa, sementara di tahun 1998 jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Selatan naik menjadi 18.782 jiwa.

## 5. Perkembangan Kota Administratif Pariaman

Setelah ditetapkannya Kota Administratif Pariaman pada tahun 1987, Kotif Pariaman mulai berbenah dan melakukan pembentukan struktur pemerintahan Kota Administratif. Ini dilihat dari personil Kota Administratif sebanyak 53 orang pegawai dimutasikan dari Kabupaten Padangpariaman. Di masing-masing kecamatan ditugaskan 12 orang pegawai sehingga totalnya menjadi 89 pegawai (Tanjung, 2014).

Untuk mempermudah jalannya pemerintahan, Kotif Pariaman melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kotif diantaranya:

### 1. Pembangunan Infrastruktur

#### a. Membangun Kantor Walikota Administratif Pariaman

Untuk menciptakan kenyamanan roda pemerintahan Kotif Pariaman, Walikota Kotif Pariaman pertama, Adlis Legan mengupayakan melakukan pembangunan Kantor Walikota Administratif. Untuk sementara Kantor Walikota Pariaman pertama dimanfaatkan bekas kantor camat Pariaman di Jalan Sudirman No. 161 Pariaman. Sedangkan Camat Pariaman Utara dijabat oleh Drs.Basyaruddin menempati kantor bangunan bekas Sekolah Dasar 01 Nareh III Koto. Camat Pariaman Tengah Martini

Mahyudin BA dengan menempati kantor di bekas kantor Walinagari Pariaman dengan melakukan perbaikan seperlunya. Camat Pariaman Selatan Drs. Guntur Dahlan dengan menempati bekas kantor Walinagari Kuraitaji. Penempatan kantor tersebut hanya bersifat sementara menjelang dibangunnya kantor permanen sesuai dengan kebutuhan bidang kerja (Tanjung, 2006).

Secara berangsur-angsur dibangun kantor Walikota Administratif Pariaman di jalan Syekh Burhanuddin yang terletak di Karan Aua. Dua bulan setelah Zainal Bakar, SH dilantik sebagai Bupati Padang Pariaman, mendampingi Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin meninjau pembangunan gedung Walikota Administratif Pariaman yang masih terbengkalai dan belum ditempati.

Beberapa hari kemudian di tahun 1990 itu, Zainal Bakar memberikan bantuan Rp. 2 juta untuk mempersiapkan dua ruangan. Kedua ruangan tersebut digunakan satu untuk ruangan Walikota Administratif dan satu lagi ruangan Sekretaris Kotif Pariaman.

Sebelumnya, Bupati Padangpariaman terdahulu, Anas Malik sudah mengusulkan kepada pemerintahan pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Supardjo Rustam dana sebesar Rp. 2 milyar yang digunakan untuk berbagai pembangunan proyek di Kabupaten Padangpariaman, termasuk membangun Kantor Walikota Administratif Pariaman. Khusus untuk pembangunan kantor Walikota Administratif Pariaman baru disetujui ketika Rudini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dengan bantuan dana sebesar Rp. 50 Juta.

Bantuan berikutnya juga diberikan Gubernur Sumatera Barat, Hasan Basri Durin sebesar Rp. 29 Jura. Dengan bantuan tersebut, Kantor Walikota Administratif Pariaman terus dibenahi untuk menampung berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Administratif Pariaman.

b. Pembangunan Trotoar dan Pohon Pelindung

Pembangunan trotoar merupakan pembenahan terhadap fisik Kota Pariaman. Trotoar pertama yang dibangun oleh Adlis Legan adalah di jalan Bagagarsyah. Untuk pelaksanaan program ini, terpaksa kuburan yang terkena dalam pembangunan trotoar di pindahkan

Selain trotoar, Adlis juga mulai menanam pohon pelindung. Pohon pelindung di sepanjang protokol sangat penting artinya dalam penataan sebuah kota. Namun gagasan trotoar dan pohon pelindung yang dilakukan adlis mendapat tanggapan sinis dari berbagai pihak. Namun Adlis tidak

menghiraikan ocehan tersebut, bahkan gagasannya di dukung oleh Bupati Padangpariaman, Anas Malik(Tanjung, 2014).

c. Pembangunan jalan

Pembangunan jalan merupakan sarana penting meningkatkan akses suatu daerah dengan daerah lain. Pembukaan jalan baru menjadi penting untuk membuka suatu daerah. Begitu pula Wakotif Adlis Legan terus berupaya membuka daerah baru dengan membangun jalan.

Banyak kritikan dan cacian yang diterima oleh Adlis Legan ketika membuka jalan baru, seperti ketika membuka jalan dari Kantor Walikota di Jalan Syekh Burhanuddin menuju Kampung Baru, berbagai cacian dilontarkan oleh masyarakat. Namun dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati Adlis menghadapinya.

d. Mengurus Tanah Penjara

Lokasi penjara, Lapas Kabupaten Padang Pariaman yang berada di pusat Kota Pariaman sudah tidak layak lagi. Apalagi dekat dengan pusat perkantoran, pasar dan terminal. Pemkab Padang Pariaman harus mencari tanah pengganti dan sekaligus mensertifikasi tanah lokasi penjara yang merupakan peninggalan Belanda. Kegiatan ini berlangsung pada masa Wakotif Adlis Legan.

e. Mendirikan SMKN 1 Pariaman

Kegiatan lain yang dilakukan Adlis Legan selama menjabat jadi Wakotif alah memproses pendirian SMKN 1 Pariaman di Lambang Desa Airsantok (Tanjung, 2014).

f. Pembangunan Dam Batang Aia Pampan

Pembangunan berikutnya di masa Kotif adalah pembangunan dam batang Aia Pampan yang sudah diusulkan kepada Bupati Padang Pariaman. Pembangunan dimulai tahun 1989 di akhir masa jabatan Adlis Legan (Tanjung, 2014).

g. Bangun Gerbang Batas Kota

Membangkitkan identitas kota dengan adanya gerbang masuk adalah salah satu program Martias. Dengan keterbatasan dana pembangunan Kotif Pariaman, tak mungkin menganggarkan dari pemerintahan Kotif. Maka ia mendekati Direktur PT.Semen Padang, Drs. Abu Bakar dan mengajukan anggaran sebesar Rp. 50 Juta untuk pembangunan gerbang dari utara dan selatan Kota tersebut.

Bantuan yang diberikan PT. Semen Padang tidak berupa dana, melainkan langsung membangun sampai siap. Walaupun akhirnya yang

siap hanya gerbang yang disebelah selatan saja, yakni di pintu masuk setelah batang Mangor Kuraitaji (Tanjung, 2014).

## **2. Kependudukan, Pendidikan dan Pariwisata**

### **a. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kota Kota Administratif Pariaman sekian tahun terus mengalami peningkatan kecuali kecamatan Pariaman Utara yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Berdasarkan data statistik tahun 1988 dan 1998, jumlah penduduk di kecamatan Pariaman Utara berjumlah 25.077 jiwa (Badan Pusat Statistik Pariaman Selatan, 1988) menurun di tahun 1998 menjadi 23.050 jiwa. Kecamatan Pariaman Tengah tahun 1988 memiliki jumlah penduduk 29.663 jiwa (Selatan, 1998) meningkat di tahun 1998 menjadi 30.792 jiwa. Kecamatan Pariaman Selatan tahun 1988 memiliki jumlah penduduk 17.798 jiwa mengalami kenaikan di tahun 1998 menjadi 18.782 jiwa.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Kota Administratif Pariaman dari tahun 1988 dan 1998 mengalami peningkatan. Di tahun 1988, jumlah penduduk Kota Administratif Pariaman berjumlah 72.538 jiwa, sedangkan di tahun 1998 berjumlah 72.624 jiwa.

### **b. Pendidikan**

Angkat pendikan di Pariaman seiring berjalannya waktu terus membaik. Terlihat jumlah sekolah yang ada di Pariaman cukup banyak seperti di Kecamatan Pariaman Utara berdasarkan data statistik tahun 1998 memiliki jumlah Sekolah Dasar negeri dan swasta sebanyak 28 sekolah, SMP negeri dan swasta sederajat berjumlah 4 sekolah, SMA negeri dan swasta sederajat berjumlah. Sementara di Kecamatan Pariaman Tengah berdasarkan data statistik tahun 1998 memiliki Sekolah Dasar negeri dan swasta sederajat berjumlah 31 sekolah, SMP sederajat berjumlah, SMA sederajat berjumlah 6 sekolah dan perguruan tinggi berjumlah 3. Dan terakhir di Kecamatan Pariaman Selatan memiliki SD sederajat berjumlah 16 sekolah, SMP sederajat 3 sekolah, SMA sederajat berjumlah 1 sekolah.

Maka secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa Kota Administratif Pariaman memiliki SD negeri dan swasta sederajat berjumlah 75 sekolah, SMP negeri dan swasta sederajat berjumlah 10 sekolah, SMA negeri dan swasta sederajat berjumlah 10 sekolah dan 3 perguruan tinggi swasta. Adapun Perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Burhanuddin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sumatera Barat, dan Akper Nan Tongga Pariaman.

### **c. Pariwisata**

Sebagai daerah yang terdapat di pesisir laut, Kota Administratif Pariaman memiliki keindahan alam yang tak kalah dari daerah lainnya. Berdasarkan data statistik tahun 1998, Kota Administratif Pariaman memiliki 6 objek wisata yang terbagi dalam 3 panorama pantai dan 3 objek wisata sejarah yang terdapat di masing-masing kecamatan. Adapun objek wisata tersebut adalah Pantai Gandoriah, Pantai Kata, Talao Pauh, Festival Budaya Tabuik, Badano (Guci Besar) dan kuburan panjang pulau Angso Duo.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa termasuk daerah yang sibuk dengan aktifitas masyarakat karena banyaknya jumlah penduduk dan sekolah yang ada di Kota Administratif Pariaman ini. Selain itu alasan lain kenapa daerah ini termasuk daerah yang sibuk dan cukup penting karena banyaknya pariwisata yang menarik dan sudah dikenal sejak lama, sebut saja Pantai Gandoriah yang sudah lama dikenal dengan adanya perlintasan kereta api yang disertai dengan stasiun yang terdapat di pantai tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Pariaman adalah sebutan dari sebuah Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Banyak pendapat yang menjelaskan asal penamaan Pariaman. Ada yang mengatakan Pariaman berasal dari kata *pai aman* yang berarti siapa yang ikut aman, ada juga yang menjelaskan *parik nan aman* yang berarti pelabuhan yang aman serta ada juga yang mengatakan *barri aman* yang berarti daratan yang aman sentosa.

Sebelum tahun 1987, Pariaman merupakan sebuah kecamatan besama 12 kecamatan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Karena pemerintah ketika itu menginginkan Kecamatan Pariaman menjadi lebih baik karena perkembangan Pariaman selaku ibukota Kabupaten Padang Pariaman berkembang cukup pesat, maka Pariaman direncanakan dibentuk menjadi sebuah kota administratif. Untuk melihat pengalaman dalam mengelola Kotif, maka pemerintah Padang Pariaman ketika itu melakukan studi banding ke beberapa Kotif yang sudah berkembang seperti Dumai Lubuk Linggau dan Denpasar yang ketika itu juga merupakan sebuah Kotif di wiayahnya masing-masing.

Kota Administratif Pariaman ditetapkan berdasarkan PP No. 33 tahun 1986. Saat menjadi Kotif, wilayah Pariaman diperluas dengan bergabungnya bagian dari Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, sehingga wilayah Kotif Pariaman terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah dan Pariaman Selatan.

Di bidang kependudukan, ketika masih menjadi sebuah kecamatan, Pariaman memiliki jumlah penduduk sebanyak 48.943 jiwa berdasarkan data statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 1982. Setelah menjadi Kota Administratif, jumlah penduduk

Kotif Pariaman berdasarkan data statistik tahun 1998 memiliki jumlah penduduk 72.624 jiwa yang terdiridari 3 kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Pariaman terus mengalami peningkatan.

Di bidang Pariwisata, ketika masih dalam wilayah Kota Administratif Pariaman, Kotif Pariaman telah memiliki memiliki 6 objek wisata yang tersebar di setiap kecamatan.

Sedangkan untuk luas wilayah sendiri, ketika Pariaman masih berupa sebuah kecamatan, Pariaman memiliki luas wilayah 67 km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah kecamatan terkecil di Kabupaten Padang Pariaman kala itu. Kemudian setelah Kecamatan Pariaman dinaikkan statusnya menjadi Kota Administratif Pariaman, terjadi penambahan wilayah dari dua kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik sehingga luas Kotif Pariaman menjadi 73,36 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 kecamatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Pariaman Selatan. (1988). *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 1988*.
- Damsuar. (t.t.). *5 Tahun Kotif Pariaman, 29 Oktober 1987- 29 Oktober 1992*. Pemerintahan Kotif.
- Hasan, A. (2021). *Pelaku Sejarah, Wawancara, STKIP Nasional Pauh Kambar, 12 Desember*.
- Lois, G. (1997). *Metode dan manfaat ilmu sejarah*. Pustaka Pelajar.
- Mestika, Z. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan* (hlm. 3).
- Pariaman, P. (2021, Juni 15). *Sejarah Kota Pariaman*". <http://pariamankota.go.id>
- Selatan, B. P. S. P. (1998). *Kecamatan Pariaman Selatan Dalam Angka 1998*. BPS.
- Suharini, E. (2007). Menemukanali Agihan Permukiman Kumuh Di Perkotaan Melalui Interpretasi Citra Penginderaan Jauh". *Jurnal Geografi*, 4(2).
- Tanjung, A. (2006). *Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa depan: V: Pustaka Artaz*.
- Tanjung, A. (2014). *Walikota Pariaman dari Adlis Legan hingga Mukhlis Rahman, Pariaman: Bapeda Kota Pariaman*.
- Tanjung, A. (2021). *Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lubuk Alung, tanggal 12 Desember*.
- Undang - Undang Republik Indoensia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa, 5 Tahun 1979 (1979). <https://bphn.go.id/data/documents/79uu005.pdf>
- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Diambil 30 Juni 2025, dari [https://www.google.com/search?q=Undang+Nomor+22+tahun+1999+tentang+Pemerintahan+Daerah&rlz=1C5CHFA\\_enID1070ID1070&oq=Undang+Nomor+22+tahun+1999+tentang+Pemerintahan+Daerah&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBgg](https://www.google.com/search?q=Undang+Nomor+22+tahun+1999+tentang+Pemerintahan+Daerah&rlz=1C5CHFA_enID1070ID1070&oq=Undang+Nomor+22+tahun+1999+tentang+Pemerintahan+Daerah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBgg)



AEEUYOTIICAEQABgWGB4yBwgCEAAY7wUyCggDEAAYgAQYogQyCg  
gEEAAYgAQYogTSAQczOTFqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF  
-8

*UU No. 12 Tahun 2002.* (t.t.). Diambil 30 Juni 2025, dari  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44443/uu-no-12-tahun-2002>